



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar-dasar pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul serta menentukan batasan masalah yang dilakukan. Batasan masalah merupakan pemilihan dari sekumpulan masalah-masalah yang timbul dalam identifikasi masalah yang kemudian akan dijawab dalam penelitian ini. Alasan mengapa batasan masalah ini dilakukan, yaitu agar pembahasan masalah tidak menyebar atau keluar dari jalur.

Selanjutnya peneliti melakukan pembatasan penelitian, dikarenakan adanya keterbatasan dalam waktu, pengumpulan informasi dan sebagainya, maka peneliti membatasi penelitian ini. Setelah peneliti menentukan identifikasi masalah, batasan masalah dan batasan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini. Terakhir, peneliti memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Maka pembahasan mengenai bab ini adalah sebagai berikut :

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan merupakan gambaran dari kondisi suatu perusahaan yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laporan keuangan mengandung data perusahaan yang kemudian akan diolah menjadi informasi bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan atau kebijakan perusahaan. Pihak berkepentingan yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan adalah manajer, kreditur, calon pemegang saham, dan pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan (*principal*). Tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan



perusahaan sejak semula dengan memaksimalkan kekayaan pemilik/pemegang saham (*principal*). *Principal* sangat bergantung dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk memantau pengambilan keputusan atau kebijakan dalam perusahaan, maka untuk mengelola perusahaan agar mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh *stakeholder*, *principal* tidak dapat menjalankan semua operasional perusahaan seorang diri, sehingga *principal* merekrut wakil-wakil untuk mengelola perusahaan. *Principal* merekrut pihak-pihak yang dianggap mampu menanggung pendelegasian tugas dan wewenang, maka perusahaan harus dikelola oleh pihak (*agent*) yang baik serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan kepentingan *principal*. Namun dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab oleh *principal* kepada *agent* untuk mengelola perusahaan, timbul konflik kepentingan antara kedua pihak (*principal* dan *agent*) di dalam perusahaan, karena pada dasarnya kedua belah pihak memiliki tujuan/kepentingan yang berbeda.

Konflik yang dapat timbul dalam pendelegasian tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan perusahaan tersebut disebut konflik keagenan (*agency problem*). Menurut Jensen & Meckling (1976), penyebab timbul konflik keagenan dalam perusahaan oleh karena adanya pendelegasian pengelolaan perusahaan kepada manajer (*agent*). Konflik keagenan dapat terjadi oleh karena ada perbedaan kepentingan, dimana pemilik perusahaan berkepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan memastikan keberlangsungan perusahaan, sedangkan manajer perusahaan memiliki kecenderungan melakukan diskresi atau memaksimalkan kepentingan pribadi (*personal goal*). Menurut Jensen & Meckling (1976), konflik kepentingan tersebut mendorong *agent* untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Upaya memaksimalkan utilitas *agent*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut dilakukan melalui tindakan tidak terpuji (*moral hazard*) yang mengatasnamakan perusahaan untuk memperoleh kesempatan pembuatan keputusan yang menguntungkan bagi *agent* tersebut. Sedangkan menurut Pratt & Zeckhauser (1985), faktor yang mendukung konflik keagenan terjadi adalah adanya asimetri informasi, dimana *agent* yang merupakan pengelola perusahaan lebih mengerti informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan, sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi. Sebagai pengelola perusahaan, *agent* lebih banyak mengetahui detail dan prospek perusahaan dibandingkan *principal*, maka salah satu penyebab konflik kepentingan terjadi adalah karena terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal* tersebut.

Timbulnya konflik keagenan menyebabkan *principal* mencari upaya penanggulangan untuk meminimalisasi konflik keagenan. Disamping upaya penanggulangan konflik tersebut, upaya yang dilakukan *principal* dalam mengatasi konflik keagenan menyebabkan suatu risiko timbulnya biaya yang disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* adalah biaya yang tidak seharusnya perlu terjadi dalam perusahaan, bila perusahaan dikelola langsung oleh *principal* atau dalam kata lain tidak dikelola oleh *agent*. *Agency cost* tersebut dapat timbul dalam bentuk : (1) *Monitoring cost*, yaitu biaya yang timbul oleh karena pengendalian yang dilakukan oleh *principal* dalam bentuk *monitoring agent* (Ang & Cox, 1997). *Monitoring agent* merupakan pihak yang ditugaskan oleh *principal* untuk bertugas sebagai pengawas perusahaan, (2) *Bonding cost*, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, (3) *Residual loss*, yaitu kerugian yang ditanggung *principal* akibat pengambilan keputusan oleh *agent* yang tidak optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ada alternatif untuk mengurangi *agency cost*, yaitu yang pertama adalah dengan melaksanakan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) demi tercapainya kepentingan *principal*, yaitu memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Data yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan salah satu indikasi kinerja perusahaan, dimana secara teoritis, praktek tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Undang-undang yang mengatur *corporate governance* adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseseroan Terbatas (UUPT) yang sebelumnya merupakan undang-undang tahun 1995 merupakan undang-undang yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi dan menjabarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan mengatur kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam organ-organ perusahaan, yaitu antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi dengan mendelegasikan peran dan tanggung jawab anggota dewan terhadap perusahaan. Undang-undang tersebut mengharuskan praktik tata kelola perusahaan pada Perseoran, akan tetapi tidak menyebutkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan diwajibkan agar mengikuti pedoman tata kelola perusahaan yang baik, maka berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2014), pedoman umum tata kelola perusahaan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka implementasi tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dipaksakan.

Menurut Claessens & Yurtoglu (2012), meningkatkan upaya tata kelola perusahaan dapat meningkatkan harga saham perusahaan karena perusahaan menggunakan biaya modal yang lebih rendah. Menurut King (2005), setiap negara perlu berusaha untuk membangun tata kelola perusahaan dalam ukuran dan pedoman tata kelola perusahaan yang telah disetujui secara internasional. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan penting untuk dilakukan dan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah disetujui.

Menurut Jensen & Meckling (1976), *corporate governance* dapat diimplementasikan melalui adanya struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer perusahaan yang dapat diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki atau dipegang oleh manajer perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan yang mendukung Jensen & Meckling (1976) mengenai teori keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan yang mendukung teori Pratt & Zeckhauser (1985) mengenai asimetri informasi. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak internal dengan pihak eksternal melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial menjadi salah satu cara untuk mengatasi konflik kepentingan dalam perusahaan, karena dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, maka manajer akan merasakan langsung hasil dari kinerja perusahaan yang dikelolanya dan diharapkan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal, sehingga kepemilikan manajerial akan berdampak baik bagi perusahaan untuk memenuhi kepentingan *principal*. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin besar upaya manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, karena manager

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Maka kepemilikan manajerial memengaruhi kinerja perusahaan dan mengurangi konflik keagenan.

Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa salah satu pihak yang dapat berperan dalam melakukan pengawasan adalah *institutional investor, broker*, dan jasa penasihat investasi. Kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan, karena dengan adanya peran pemerintah atau institusi (pemegang saham) yang berperan sebagai *monitoring agent* di dalam perusahaan. Menurut Brealey, Myers, dan Franklin (2008), *monitoring* dapat dilakukan oleh analis sekuritas dan manager portfolio dengan tujuan mengurangi konflik keagenan (*agency problem*) perusahaan, akan tetapi untuk melakukan *monitoring* oleh analis sekuritas dan manager portfolio dibutuhkan biaya untuk membayar balas jasa *agent* tersebut, sehingga menimbulkan biaya tambahan. Maka kepemilikan institusional merupakan solusi untuk mengurangi *agency problem, agency cost*, dan mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal perusahaan. Kepemilikan institusional perusahaan menjadi sumber kekuasaan bagi pemerintah atau institusi atas perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang pengambilan keputusan atau suatu kebijakan perusahaan oleh manajer yang dianggap tidak menguntungkan. Maka kepemilikan institusional akan menjadi faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan untuk mengurangi konflik keagenan dan *agency cost*. Menurut Jensen & Meckling (1976), direksi dan pemegang saham memiliki peran dalam pengelolaan perusahaan, khususnya untuk mengurangi biaya keagenan. Maka dengan diadakannya sejumlah direksi dalam suatu perusahaan, perusahaan tersebut sudah mengupayakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga kepemilikan institusional mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Ang & Cox (1997) dewan komisaris independen (*outside director*) adalah individu yang bertanggung jawab atas pengawasan secara umum atas pengelolaan manajer perusahaan dan memberikan saran-saran kepada direksi. Maka dengan diadakannya sejumlah dewan komisaris, perusahaan mengupayakan pengawasan perusahaan yang baik. Komisaris dibagi menjadi dua kategori, komisaris terafiliasi dan komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak eksternal perusahaan yang dianggap profesional untuk menjadi pengawas eksternal. Hasil pembelajaran peneliti pada masa perkuliahan menyatakan bahwa perekrutan komisaris independen di Indonesia pada umumnya adalah seseorang yang memiliki wawasan, jaringan koneksi yang luas, serta pengalaman pada bidang tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan Nugrahani dan Nugroho (2010), dewan komisaris independen memengaruhi kinerja perusahaan dan mengurangi konflik keagenan dengan adanya pengawasan.

Selain *corporate governance*, upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberlakukan kebijakan hutang dan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Menurut teori arus kas bebas (Jensen, 1986), ketika ada kelebihan arus kas/uang, *agent* cenderung melakukan pemborosan atau menghambur-hamburkan uang seenaknya (*moral hazard*). Jika *agent* melakukan penghambur-hamburan kas, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan akan meningkat, dimana untuk memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan, jumlah keuntungan perusahaan akan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Hutang merupakan salah satu struktur pendanaan suatu perusahaan dimana dengan diadakannya struktur pendanaan melalui hutang, *agent* memiliki tanggung jawab atau berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kreditur. Semakin besar pendanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan melalui hutang, maka semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang disebut dengan *financial leverage*. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk membayar beban bunga, sehingga arus kas yang ada tidak dapat dihambur-hamburkan oleh manajer (*agent*) karena diperuntukan membayar bunga kepada kreditor. Maka berdasarkan penjelasan di atas, pengambilan kebijakan hutang ikut berperan dalam upaya meningkatkan kinerja yang dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan karena dengan melakukan hutang, perusahaan mendapatkan sumber pendanaan dan memperoleh alternatif untuk mengatasi konflik keagenan. Kebijakan hutang merupakan salah satu dari praktik *agency cost*, yaitu *bonding cost* (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, Ang & Cox (1997) mendukung teori Jensen (1986) dengan mengatakan bahwa hutang mampu menjadi salah satu fungsi pengawasan jika digunakan dalam jumlah besar, karena kreditor akan pengawasi penggunaan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan. Maka hutang dianggap dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Kelvin & Iryanto (2012), Purwani (2010), Prasinta (2012), maka disimpulkan bahwa penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan hasil penelitian Novrianti, Gusnardi, dan Armas (2012) mengatakan bahwa penerapan *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, berdasarkan penelitian Primadanti (2013) dan Ludjianto et al (2014), *leverage* memengaruhi kinerja perusahaan, sedangkan berdasarkan penelitian Rise (2013), *leverage* tidak memengaruhi kinerja perusahaan.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki judul “ANALISIS PENGARUH INDIKATOR MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, JUMLAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DIREKSI, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN) DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN *REAL ESTATE* DAN *PROPERTY* DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2011-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang timbul serta dapat dibahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi kinerja perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi konflik keagenan ?
3. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi biaya keagenan ?
4. Apakah kepemilikan manajerial memengaruhi kinerja perusahaan ?
5. Apakah kepemilikan manajerial memengaruhi konflik keagenan ?
6. Apakah proporsi komisaris independen memengaruhi kinerja perusahaan ?
7. Apakah proporsi komisaris independen memengaruhi konflik keagenan ?
8. Apakah jumlah direksi memengaruhi kinerja perusahaan ?
9. Apakah jumlah direksi memengaruhi konflik keagenan ?
10. Apakah *leverage* memengaruhi kinerja perusahaan ?
11. Apakah *leverage* memengaruhi konflik keagenan ?

C. Batasan Masalah

Setelah memaparkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, peneliti mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi untuk diteliti. Batasan masalah berfungsi sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari jalur atau membahas ruang lingkup masalah yang telah dipilih oleh peneliti untuk dibahas. Maka masalah penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi kinerja perusahaan?
2. Apakah jumlah direksi memengaruhi kinerja perusahaan?
3. Apakah proporsi komisaris independen memengaruhi kinerja perusahaan?
4. Apakah *leverage* memengaruhi kinerja perusahaan?

D. Batasan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti membuat sejumlah kebijakan yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian. Akibat dari keterbatasan waktu, tenaga, dan aspek-aspek lainnya, maka peneliti membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan *real estate & property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011, 2012, dan 2013 yang diperoleh dari buku *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* edisi 2014,

2. Berdasarkan sampel

Sampel yang diambil adalah perusahaan *real estate & property* yang memenuhi kriteria yang telah dibuat oleh peneliti pada bab yang membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti memaparkan rumusan mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut.

Peneliti merumuskan masalah ini adalah “Apakah pengaruh indikator *Corporate Governance* (kepemilikan institusional, jumlah direksi, proporsi dewan komisaris independen) dan hutang terhadap kinerja perusahaan?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang timbul dalam latar belakang masalah dengan batasan-batasan dan perumusan masalah yang telah dipaparkan. Peneliti memiliki beberapa tujuan tertentu, yaitu untuk :

1. Mengetahui apakah kepemilikan institusional memengaruhi kinerja perusahaan,
2. Mengetahui apakah jumlah direksi memengaruhi kinerja perusahaan,
3. Mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen memengaruhi kinerja perusahaan,
4. Mengetahui apakah *leverage* memengaruhi kinerja perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi beberapa pihak, yaitu bagi :

1. Pihak perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat mengevaluasi kinerja perusahaan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan tersebut dimata publik,

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi terkait dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atas penanaman modal yang dilakukan investor.

3. Bidang akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang serta menjadi sumber wawasan bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan topik sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.